



Analisis Penerapan Pariwisata Berbasis Masyarakat Dengan Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan Dan Aspek Budaya Di Destinasi Lembah Harau

Salsabilla¹, Santi Deswita²

¹²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Submit : 28 Januari 2026

Revisi : 08 Februari 2026

Diterima : 18 April 2026

Diterbitkan: 22 Mei 2026

Kata Kunci

pariwisata berbasis komunitas, pariwisata berkelanjutan, ekonomi lokal, lingkungan, budaya

Correspondence

E-mail: shabilla913@gmail.com

A B S T R A K

Penelitian ini dilakukan untuk menilai implementasi konsep Community Based Tourism (PTM) di destinasi wisata Lembah Harau dari perspektif ekonomi, lingkungan, dan budaya, menggunakan indikator PT yang diusulkan oleh Suansri. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang praktik pariwisata berbasis komunitas yang berkembang di daerah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, observasi langsung di lokasi penelitian, dan peninjauan materi pendukung yang relevan. Informan penelitian meliputi pengelola homestay, pengusaha pariwisata lokal, pemimpin masyarakat, pengelola destinasi wisata, dan perwakilan pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Lembah Harau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat telah berperan aktif dalam banyak kegiatan pariwisata, khususnya dalam pengelolaan homestay, perusahaan kuliner, dan layanan pendukung pariwisata, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum terdistribusi secara merata karena adanya perbedaan akses terhadap permodalan dan kemampuan pengelolaan usaha. Dari sisi lingkungan, kesadaran masyarakat terhadap upaya pelestarian kawasan wisata mulai tumbuh, namun belum didukung oleh kebijakan dan sistem pengelolaan lingkungan yang terencana dengan baik. Sementara itu, pada aspek budaya, nilai-nilai budaya Minangkabau masih dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi pemanfaatannya sebagai bagian dari daya tarik pariwisata belum dilakukan secara optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan CBT di Destinasi Wisata Lembah Harau telah berlangsung, tetapi implementasinya masih belum menyeluruh dan memerlukan penguatan pada berbagai aspek pendukung.

Abstract

This study was conducted to assess the implementation of the Community-Based Tourism (CBT) concept in the Harau Valley tourist destination from an economic, environmental, and cultural perspective, using the CBT indicators proposed by Suansri. This study employed descriptive qualitative techniques, aiming to obtain an in-depth overview of the community-based tourism practices developing in the area. Data collection was conducted through in-depth interviews with stakeholders, direct observation at the research site, and review of relevant supporting materials. The research informants included homestay managers, local tourist entrepreneurs, community leaders, tourism destination managers, and representatives of the local government involved in tourism management in the Harau Valley. The results demonstrate that

the local community has played an active role in many tourism activities, particularly in homestay management, culinary companies, and tourism support services, which have a direct impact on raising community income. However, the economic benefits generated have not been evenly distributed due to differences in access to capital and business management capabilities. From an environmental perspective, community awareness of tourism area conservation efforts has begun to grow, but it is not yet supported by well-planned environmental management policies and systems. Meanwhile, in terms of culture, Minangkabau cultural values are still preserved in the community's social life, but their utilization as part of tourism attractions has not been optimized. Overall, this study concludes that the implementation of CBT in the Harau Valley Tourism Destination has taken place, but its implementation is still not comprehensive and requires strengthening in various supporting aspects.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Sektor pariwisata saat ini memainkan fungsi penting dalam pembangunan nasional di banyak negara (Nuraini, 2016). Pada tahun 2017, bisnis pariwisata di seluruh dunia meningkatkan kehidupan jutaan orang dengan merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, mendorong pembangunan, dan mendorong toleransi. Pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang direncanakan dan dikelola secara strategis akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan peluang kerja (Hasanah et al., 2025). Selain itu, perluasan pariwisata dapat menghasilkan sumber daya keuangan yang dapat dialokasikan untuk perlindungan dan pelestarian budaya dan lingkungan, sehingga menguntungkan penduduk setempat. Ketika pariwisata dipandang sebagai suatu sistem, analisisnya tidak dapat dipisahkan dari subsistem lain, termasuk faktor politik, sosial-ekonomi, dan budaya. Subsistem-subsistem ini saling bergantung dan saling terkait (*interconnectedness*) (Kusnandar, 2012)

Pembentukan Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT) dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Secara global, CBT tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan pariwisata tetapi juga sebagai komponen integral dari inisiatif pengentasan kemiskinan. CBT dicirikan sebagai pariwisata yang mengakui keberlanjutan budaya, sosial, dan lingkungan (Muhammad Djakfar, 2017). Jenis pariwisata ini dikelola dan dipertahankan oleh masyarakat untuk masyarakat, memungkinkan wisatawan untuk memperoleh pemahaman dan wawasan tentang masyarakat lokal dan gaya hidup mereka. Pariwisata berbasis masyarakat (*Community-based tourism/CBT*) adalah paradigma pengembangan pariwisata yang memprioritaskan pengakuan nilai dan kebutuhan masyarakat, bertujuan untuk mendorong pariwisata yang selaras dengan aspirasi, inisiatif, dan kapasitas penduduk lokal. CBT bukanlah inisiatif pariwisata yang dirancang untuk memperluas keterlibatan investor (Subarkah & Rachman, 2018).

Gagasan pariwisata berbasis masyarakat telah muncul sejak tahun 1990-an. Pariwisata berbasis masyarakat melibatkan pengembangan barang-barang pariwisata yang memprioritaskan keterlibatan masyarakat (Sayekti, 2019). Pariwisata berbasis masyarakat dapat berfungsi sebagai platform bagi masyarakat lokal untuk terlibat lebih efisien dengan berbagai pemangku kepentingan dan menjamin penggabungan ide dan prioritas mereka. Strategi ini berupaya untuk mengatasi kebutuhan sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat dengan menawarkan produk pariwisata (Choudhary et al., 2021).

Posisi partisipasi adalah posisi yang diasumsikan oleh individu tergantung pada kebutuhan atau secara berkala (Jamaludin et al., 2023). Menciptakan lapangan kerja, mengurangi pariwisata telah lama dipandang sebagai sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2006). Posisi ini menjadi semakin penting bagi daerah-daerah yang memiliki aset alam dan budaya yang khas. Dalam perkembangan terakhir, pengelolaan pariwisata tidak lagi hanya diukur dari peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas pariwisata mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan budaya lokal. Ketika keseimbangan ini tidak tercapai, pariwisata justru berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti ketimpangan manfaat ekonomi, kerusakan lingkungan, serta menurunnya nilai dan identitas budaya masyarakat setempat (Siregar, 2023).

Model pariwisata konvensional yang cenderung terpusat dan berorientasi pada investor dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat secara aktif. Skenario ini telah mendorong munculnya model *Community-based tourism* (CBT) sebagai strategi manajemen pariwisata alternatif yang memprioritaskan masyarakat sebagai agen utama (Maturbongs & Lekatompessy, 2020). Dalam kerangka CBT, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penerima dampak, tetapi juga secara aktif terlibat dalam perancangan, pengelolaan, dan pemanfaatan kegiatan pariwisata. Berbagai studi dalam 10 tahun terakhir telah membuktikan bahwa penerapan CBT dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, meningkatkan lembaga lokal, dan membantu pelestarian budaya lokal (Prananta & Lokaprasidha, 2018).

Meskipun demikian, implementasi CBT di berbagai destinasi wisata belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep idealnya. Sejumlah penelitian menemukan bahwa perkembangan aspek ekonomi dan sosial sering kali tidak diiringi dengan pengelolaan lingkungan yang memadai dan mekanisme partisipasi masyarakat yang merata. Rendahnya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta dominasi pihak tertentu dalam pengelolaan pariwisata masih menjadi permasalahan yang sering dijumpai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan CBT sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal dan kekhasan masing-masing tempat (Widhasti et al., 2018).

Pemerintah telah mengidentifikasi Sumatera Barat sebagai destinasi wisata utama di Indonesia, dengan beragam sumber daya alam. Wilayah ini menawarkan berbagai macam atraksi wisata, mulai dari atraksi alam hingga atraksi sejarah dan budaya, kenikmatan kuliner, dan bahkan atraksi buatan manusia, menjadikannya destinasi populer bagi wisatawan domestik dan internasional. Selain itu, Sumatera Barat juga dikenal sebagai salah satu lokasi wisata halal yang sangat kompetitif di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui sejumlah penghargaan yang diraih pada ajang *World Halal Tourism Award* tahun 2016, antara lain kategori *World's Best Halal Culinary Destination*, *World's Best Halal Destination*, dan *World's Best Halal Tour Operator*. Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai salah satu wilayah di Sumatera Barat, memiliki kekayaan alam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, dengan bentang alam berupa lembah, tebing, sungai, air terjun, ngarai, serta kawasan hutan yang didukung oleh keanekaragaman flora dan fauna (Subarkah & Rachman, 2018).

Destinasi wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, merupakan daerah wisata alam dengan potensi pengembangan yang cukup besar melalui strategi pariwisata berbasis komunitas. Keunikan bentang alam berupa lembah dan tebing granit, serta keberadaan air terjun dan budaya Minangkabau yang masih hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadi daya tarik utama kawasan ini. Perkembangan pariwisata di Lembah Harau telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat, terutama melalui usaha homestay, kuliner, dan jasa wisata. Namun, peningkatan aktivitas wisata juga memunculkan sejumlah persoalan, seperti belum meratanya distribusi

manfaat ekonomi, permasalahan kebersihan, serta pengelolaan lingkungan yang belum optimal. Selain itu, potensi budaya lokal belum sepenuhnya terintegrasi dalam aktivitas pariwisata yang ada.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, sebagian besar studi mengenai CBT masih menempatkan fokus pada wilayah desa wisata atau membahas aspek keberlanjutan secara terpisah. Penelitian yang mengkaji penerapan CBT dengan mengaitkan aspek ekonomi, lingkungan, dan budaya secara bersamaan, khususnya dengan menggunakan indikator CBT menurut Suansri pada destinasi wisata alam seperti Lembah Harau, Penelitian di bidang ini masih relatif sedikit. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang menggarisbawahi orisinalitas studi ini.

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa praktik pariwisata berbasis masyarakat di Lembah Harau telah berjalan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip CBT secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif untuk mengevaluasi implementasi konsep CBT dan metode lapangan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Studi ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi implementasi (CBT) di berbagai dimensi ekonomi, lingkungan, dan budaya.

Dampak jangka panjang dari program partisipasi masyarakat dalam pariwisata berbasis sosial dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Program ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan peluang usaha bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang. Selain itu, program ini juga dapat memperkuat identitas budaya lokal dengan mempertahankan tradisi dan kearifan lokal dalam aktivitas pariwisata. Dengan meningkatnya kemakmuran, masyarakat akan lebih tangguh dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Lebih jauh lagi, generasi muda akan semakin tertarik untuk berpartisipasi dalam sektor pariwisata, yang mengarah pada regenerasi dalam pengelolaan situs pariwisata berbasis sosial. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga secara signifikan menguntungkan peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata. Oleh karena itu, program ini harus terus diperkuat untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan menggunakan teknik yang tepat, pariwisata berbasis sosial dapat berfungsi sebagai paradigma untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan (Mujalli & Syarif, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pariwisata berbasis komunitas di destinasi wisata Lembah Harau dari perspektif ekonomi, lingkungan, dan budaya, serta merumuskan implikasi manajemen yang mendukung keberlanjutan destinasi tersebut. Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada kemajuan studi akademis tentang pariwisata berbasis komunitas dan berfungsi sebagai pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam membangun aturan manajemen pariwisata yang lebih berkelanjutan.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif bersama dengan kerangka deskriptif untuk secara menyeluruh meneliti pelaksanaan inisiatif *Community Based Tourism* (CBT) di lokasi wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Dewi et al., 2023). Lokasi penelitian dipilih secara purposif, dengan mempertimbangkan bahwa daerah tersebut menggambarkan perkembangan kegiatan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal. Informan penelitian terdiri atas pengelola *homestay*, pelaku usaha pariwisata, tokoh masyarakat, pengelola destinasi, serta unsur pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan pariwisata. Kajian difokuskan pada penerapan CBT yang ditinjau melalui aspek ekonomi, lingkungan, dan budaya.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan penelusuran dokumen yang relevan, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama, didukung oleh pedoman

wawancara dan lembar observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan mensintesis temuan yang berkaitan dengan dimensi ekonomi, lingkungan, dan budaya, kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Validitas data dipastikan melalui penerapan triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan.

3. Hasil dan Pembahasan

Community Based Tourism (CBT) adalah model pariwisata di mana kepemilikan dan pengelolaan berada di tangan masyarakat lokal dan diorganisir di tingkat komunitas. Model pariwisata ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjamin keberlanjutan kehidupan sosial, pelestarian tradisi dan budaya, serta perlindungan terhadap sumber daya alam dan warisan budaya yang dimiliki. Dalam penerapan CBT, masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal, yang pada akhirnya mendorong penguatan identitas serta rasa bangga masyarakat seiring dengan berkembangnya aktivitas pariwisata di daerah tersebut (Zubair, 2020).

Pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata diawali peningkatan kesadaran dengan kegiatan sosialisasi serta pengabdian kepada masyarakat, kemudian selanjutnya peningkatan kapasitas dengan beberapa pelatihan pengelolaan pariwisata berdasarkan kebutuhan, pembentukan kelompok sadar pariwisata yang bertugas mengelola potensi yang ada serta melakukan evaluasi perkembangannya. Pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata ini berjalan dengan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya yang ada di kehidupan masyarakat. Peran serta pemuda dimaksimalkan sebagai upaya mendorong desa wisata berkelanjutan (Le Blanc, 2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Community Based Tourism* (CBT) di Destinasi Wisata Lembah Harau telah berjalan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan pariwisata. Keterlibatan tersebut terutama tampak pada pengelolaan homestay, usaha kuliner, serta penyediaan jasa pendukung wisata yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya kesesuaian antara praktik di lapangan dengan konsep dasar CBT yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan pariwisata. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum merata dan masih dipengaruhi oleh penguasaan sumber daya, kemampuan manajerial, serta akses terhadap informasi dan permodalan. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan CBT di Lembah Harau telah berlangsung, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip ideal CBT.

1. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, studi ini mengungkapkan bahwa aktivitas pariwisata memiliki dampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Ketersediaan homestay dan bisnis kuliner menyediakan sumber pendapatan tambahan yang cukup besar, terutama bagi mereka yang tinggal di dekat destinasi wisata. Temuan ini sesuai dengan temuan Utami dkk., yang menyatakan bahwa CBT berperan dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, studi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi keuntungan ekonomi. Penduduk tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata karena keterbatasan sumber daya dan kemampuan pengelolaan.

Masyarakat didorong untuk memulai usaha, seperti menawarkan jasa pemandu wisata, menyewakan peralatan trekking, dan menyediakan akomodasi homestay. Selain itu, masyarakat

memproduksi barang olahan untuk dijual kepada wisatawan. Pemerintah dan pengelola desa pariwisata menawarkan pelatihan dan membantu pemasaran produk lokal, sehingga mendorong pengembangan usaha masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan penduduk dan memperkuat ekonomi masyarakat (Hidayat, 2025).

2. Aspek Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berbasis sosial. Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana akan memastikan bahwa destinasi wisata dapat bertahan dalam jangka panjang. Masyarakat lokal dapat berperan sebagai penjaga lingkungan dengan menerapkan praktik ekowisata yang ramah lingkungan (Maulida et al., 2024).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan keberlanjutan di wilayah pariwisata mulai meningkat, meskipun belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Upaya pelestarian lingkungan sebagian besar masih bersifat individual dan belum didukung oleh aturan teknis yang jelas maupun sistem pengelolaan lingkungan yang terpadu. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan CBT pada aspek lingkungan belum berjalan secara optimal. Yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan memerlukan dukungan regulasi dan pengawasan yang memadai. Sebaliknya, lemahnya koordinasi dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di Lembah Harau menunjukkan kesesuaian yang mengidentifikasi aspek lingkungan sebagai salah satu kelemahan dalam penerapan CBT.

3. Aspek Budaya

Aspek budaya, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau masih terpelihara dalam kehidupan sosial sehari-hari. Namun, pemanfaatan budaya lokal sebagai bagian dari daya tarik pariwisata belum dikembangkan secara optimal dan terencana. Aktivitas pariwisata di Lembah Harau masih lebih menonjolkan potensi alam, sementara unsur budaya belum terintegrasi secara konsisten dalam paket maupun aktivitas wisata. Di sisi lain, kondisi ini juga mengindikasikan adanya potensi komodifikasi budaya apabila pengembangan pariwisata tidak disertai penguatan peran masyarakat dalam menjaga nilai dan makna budaya.

Secara teoretis, temuan penelitian ini mempertegas relevansi konsep CBT menurut Suansri sebagai kerangka analisis dalam menilai keberlanjutan destinasi wisata berbasis masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi CBT tidak bersifat dikotomis, melainkan berada dalam spektrum penerapan yang dipengaruhi oleh konteks lokal, kapasitas masyarakat, serta dukungan kelembagaan. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penegasan bahwa penerapan CBT pada destinasi wisata alam yang sedang berkembang, seperti Lembah Harau, cenderung berlangsung secara parsial sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pengelola destinasi dan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pariwisata berbasis masyarakat. Langkah yang perlu dilakukan antara lain peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pengelolaan usaha wisata, penyusunan serta penerapan regulasi lingkungan yang lebih jelas, dan pengembangan program wisata yang mengintegrasikan budaya lokal secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan lembaga lokal dan prosedur partisipasi inklusif sangat penting agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya dalam jangka panjang.

4. Kesimpulan

Temuan penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa praktik *Community-Based Tourism* (CBT) telah diterapkan di Destinasi Wisata Lembah Harau, dengan melibatkan masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan pariwisata. Keterlibatan tersebut terutama tampak pada pengelolaan homestay, usaha kuliner, serta penyediaan jasa pendukung wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat. Situasi ini menggambarkan bahwa pengelolaan pariwisata di Lembah Harau telah berpegang pada prinsip-prinsip utama CBT (*Community-Based Tourism*), yang menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Namun, pelaksanaan CBT belum sepenuhnya mewakili gagasan ideal, karena partisipasi masyarakat dan distribusi keuntungan pariwisata masih tidak merata.

Dari sudut pandang ekonomi, kegiatan pariwisata telah memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan lokal, khususnya bagi individu yang terlibat langsung dalam usaha pariwisata. Namun, manfaat ekonomi tersebut belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan akses terhadap permodalan, informasi, dan kemampuan pengelolaan usaha menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Pada aspek lingkungan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian kawasan wisata mulai terlihat, tetapi pelaksanaannya belum terstruktur dan belum didukung oleh kebijakan serta sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, pada aspek budaya, nilai-nilai budaya lokal masyarakat Minangkabau masih terpelihara dalam kehidupan sosial, namun pemanfaatannya sebagai daya tarik wisata belum terintegrasi secara optimal dalam pengembangan pariwisata.

Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa konsep CBT yang dikemukakan oleh Suansri masih relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan CBT tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan kapasitas masyarakat, sehingga pelaksanaannya cenderung berlangsung secara parsial. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini menunjukkan perlunya upaya penguatan kapasitas masyarakat, perbaikan tata kelola lingkungan, serta pengembangan program pariwisata yang mampu mengintegrasikan unsur budaya lokal secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut penting untuk mendorong optimalisasi penerapan CBT di Lembah Harau agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara lebih adil dan berkelanjutan oleh masyarakat setempat.

Disarankan agar pengelola destinasi dan pemerintah daerah meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pengelolaan usaha pariwisata dan perluasan akses permodalan guna mendorong pemerataan manfaat ekonomi. Selain itu, sangat penting untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan pengelolaan lingkungan yang eksplisit dan berkelanjutan dengan partisipasi aktif masyarakat. Pengembangan pariwisata juga perlu mengintegrasikan potensi budaya lokal secara terencana dan partisipatif agar nilai dan identitas budaya tetap terjaga. Penguatan kelembagaan lokal dan mekanisme partisipasi yang inklusif menjadi penting untuk memastikan penerapan *Community Based Tourism* berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di Destinasi Wisata Lembah Harau.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2006). *Wisata, Ekologi Pariwisata Tata Laksana Pengelolaan. Objek dan Daya Tarik. Pembangunan Kelautandan Kewilayahan.*
- Choudhary, P., G, V. S., Khade, M., Savant, S., Musale, A., G, R. K. K., Chelliah, M. S., & Dasgupta, S. (2021). Empowering blue economy: From underrated ecosystem to sustainable industry. *Journal of Environmental Management*, 291. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112697>
- Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M. A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K. (2023). *Dasar metode penelitian.* PT MAFY MEDIA LITERASI

INDONESIA.

- Hasanah, A. A. N., Aisyah, A. S. N., Fateha, A. A., & Kurniawan, Z. Z. A. (2025). STRATEGI PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENDUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): STUDI DI BAPENDA KABUPATEN JEMBER. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 37–48.
- Hidayat, F. (2025). Pemberdayaan Masjid Baitul Makmur Kapalo Koto Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat: Strategi Dan Tantangan. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 158–171.
- Jamaludin, N., Miftahurrahmah, M., & Muizzudin, M. (2023). Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(2), 155–165.
- Kurniawan, Z. A., Aisyah, S. N., & Mubarak, A. (2024). Mengasah Soft Skill dan Profesionalisme melalui Mini Seminar: Program Pengabdian untuk Mahasiswa Bisnis dan Komunitas Lokal. *Jurnal Dedikasia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 58–68.
- Kusnandar, S. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jakarta. Universitas Indonesia.*, (32), 1–20.
- Le Blanc, D. (2015). 'Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets. *Sustainable Development*, 23(3), 176–187. <https://doi.org/10.1002/sd.1582>
- Maturbongs, E. E., & Lekatompessy, R. L. (2020). Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Merauke. *Sumber*, 81, 59.
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 7, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Muhammad Djakfar. (2017). *Pariwisata Halal: Perspektif Multidimensi*. UIN Maliki Press.
- Mujalli, & Syarif, M. (2024). MODEL PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) Desa. *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.56998/jr.v7i01.72>
- Nuraini, I. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*. UMMPress.
- Prananta, R., & Lokaprasidha, P. (2018). Prospek Pengembangan Wisata Halal Di Provinsi Sumatera Barat. *Prosiding Seminar Nasional Pariwisata 2018 Universitas Jember*, 261–272.
- Sayekti, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Kajian*, 24(3), 159–171.
- Siregar, A. R. (2023). Manajemen Perubahan Budaya Organisasi. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(1), 551–563.
- Subarkah, R., & Rachman, J. B. (2018). Wisata Halal Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Halal Tourism for Sustainable Development Goals. *Konferensi Nasional Ilmu ...*, March, 1–6.
- Suri, L. A. (2019). Pembangunan Obyek Wisata Berbasis Komunitas Lokal pada Jorong Kaluang Tapi, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 5(2), 74–86. <https://doi.org/10.25077/jsa.5.2.74-86.2019>
- Widhasti, G. B., Damayanti, C., & Sardjono, H. S. (2018). Diplomasi publik pemerintah republik Indonesia melalui pariwisata halal. *Jurnal Solidaritas*, 1(1).
- Zubair, F. (2020). Pemahaman komunitas terhadap program community relations di Palimanan dan Citeureup. *PRofesi Humas*, 5(1), 98–120.